

**ANALISIS DANA TRANSFER PUSAT TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH
(Kasus Kota Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu)**

Seisi Steven Tilaar¹, Vecky A.J. Masinambow², Daisy S.M. Engka³
Seisitilaar77@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana pengaruh dana transfer pusat terhadap belanja pemerintah daerah di kota-kota di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Data yang digunakan data sekunder dimana data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2018. Alat analisis yang digunakan ialah *evIEWS 8*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negative dan signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan dana bagi hasil berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci : DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal

ABSTRACT

*The purpose of this study is to see how the influence of central transfer funds on local government spending in cities in North Sulawesi Province. The analytical method used is regression analysis. The data used is secondary data where the data is taken from the Central Bureau of Statistics for North Sulawesi Province 2014-2018. The analytical tool used is *evIEWS 8*. The results show that general allocation funds have a negative and significant effect on capital expenditures, special allocation funds have a positive and significant effect on capital expenditures and profit sharing funds have a negative but not significant effect on capital expenditures in North Sulawesi Province.*

Keywords: DAU, DAK, DBH and Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

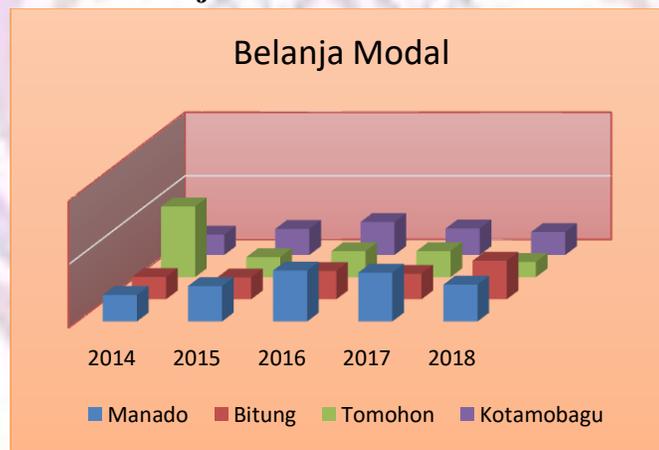
Belanja modal adalah salah satu jenis pengeluaran APBD untuk memperbanyak kapitalisasi asset tertentu dan menambah manfaat dari aset lebih dari satu periode akuntansi dengan ketentuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Satuan kerja dalam pemerintah daerah

menggunakan aset tetap pada belanja modal untuk membiayai kegiatannya. Biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum menjadi bagian dari belanja rutin pemerintah dalam belanja modal (Syaiful, 2007). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif misalnya untuk aktifitas pembangunan (Siska, 2014).

Pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Priambudi 2016).

Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah. Provinsi Sulawesi Utara juga merupakan provinsi dengan otonomi daerah yaitu berhak mengelolah dan mengurus daerahnya sendiri. Dalam penelitian ini di fokuskan pada empat Kota yang ada di provinsi Sulawesi yaitu Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu. Berikut adalah perkembangan belanja modal di empat kota di provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

Grafik 1
Belanja Modal Tahun 2014-2018



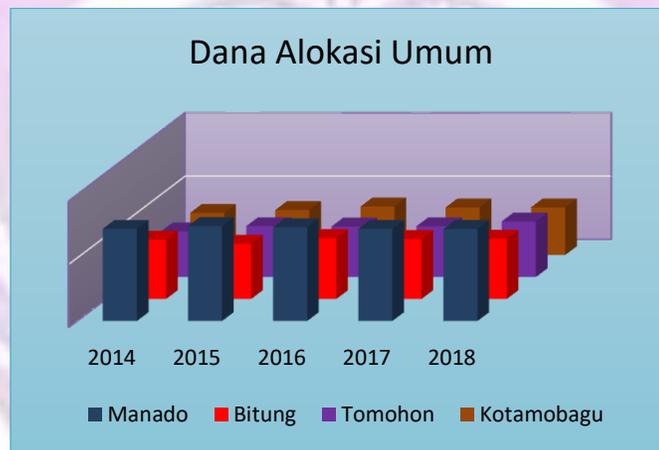
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Belanja modal untuk empat kota di Provinsi Sulawesi Utara cenderung fluktuatif selama tahun 2014 sampai 2018. Belanja Modal Kota Manado pada tahun 2014 sebesar 208,880,230,185 juta rupiah terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2016 menjadi 399,836,332,915 juta rupiah dan mengalami penurunan sampai tahun 2018 sebesar 288,819,124,007 juta rupiah. Untuk belanja modal Kota Bitung pada tahun 2014 sebesar 174,857,043,508 juta rupiah, pada tahun 2015 turun menjadi 171,232,907,302 juta rupiah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 222,967,119,701 juta rupiah kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 200,434,060,632 juta rupiah dan pada tahun 2018 belanja modal Kota Bitung meningkat menjadi 302,434,060,632 juta rupiah. Belanja modal untuk Kota Tomohon pada tahun 2014 sebesar 555,223,362,453 juta rupiah

mengalami penurunan yang sangat pesat pada tahun 2015 menjadi 156,670,785,831 juta rupiah kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2017 menjadi 204,837,523,409 juta rupiah akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 120,029,973,348 juta rupiah. Selanjutnya belanja modal untuk Kota Kotamobagu pada tahun 2014 sebesar 158,678,729,474 juta rupiah terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016 menjadi 258,605,472,243 juta rupiah akan tetapi mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 179,319,108,130 juta rupiah.

Dana Perimbangan dan transfer lainnya merupakan anggaran transfer ke daerah dalam APBN sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta transfer lainnya yang terdiri dari Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari bantuan keuangan tersebut. Berikut adalah perkembangan dana alokasi umum di empat kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 2
Dana Alokasi Umum Tahun 2014-2018

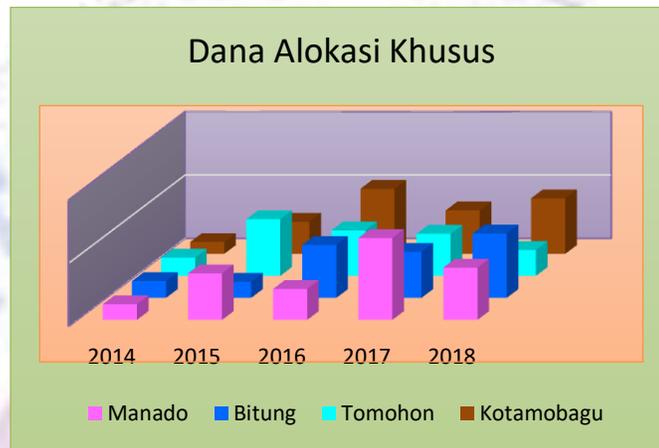


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data yang ada untuk dana alokasi umum (DAU) pada empat kota di Provinsi Sulawesi Utara, dapat dilihat bahwa penerimaan dana alokasi umum cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Untuk dana alokasi umum di empat kota penerimaan terbesar pada Kota Manado. Tahun 2014 penerimaan DAU sebesar 729.213.779.000 juta rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 750.810.852.000 juta rupiah akan tetapi mengalami penurunan sampai tahun 2018 sehingga menjadi 727.970.839.000 juta rupiah. Sedangkan untuk penerimaan Dana Alokasi Umum paling sedikit yaitu di Kota Kotamobagu dimana pada tahun 2014 DAU sebesar 333.000.351.150 juta rupiah mengalami peningkatan sampai tahun 2016 sebesar 382.638.269.000 juta rupiah akan tetapi tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 375.916.545.000 juta rupiah dan pada tahun 2018 dana alokasi umum Kota Kotamobagu naik menjadi 376.388.719.000 juta rupiah. Selain dana alokasi umum yang merupakan juga dana transfer dari pusat untuk daerah adalah dana alokasi khusus dimana

bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan berikut adalah data perkembangan dana alokasi khusus di kota-kota di Provinsi Sulawesi Utara:

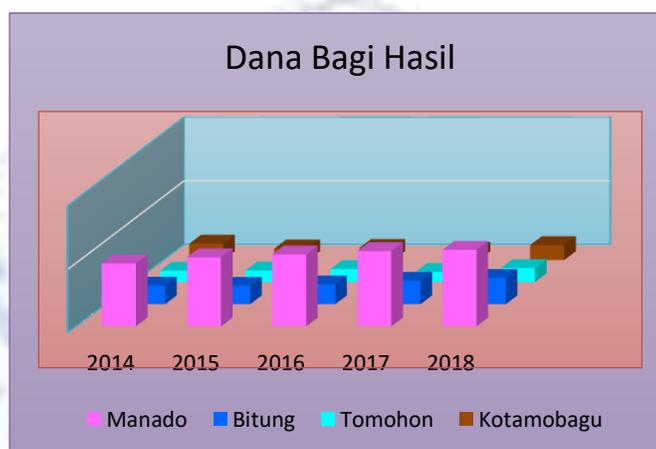
Grafik 3
Dana Alokasi Khusus Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data yang ada perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) selama kurun waktu tahun 2014 sampai 2018 mengalami kenaikan dan penurunan dana alokasi khusus di empat kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado penerimaan DAK pada tahun 2014 sebesar 49,614,960,000 juta rupiah, mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 147,113,780,000 juta rupiah akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 98,039,428,469 juta rupiah. Pada tahun 2017 DAK Kota Manado meningkat menjadi 258,838,544,606 juta rupiah dan pada tahun 2018 turun menjadi 165,407,742,587. Kota Bitung pada tahun 2014 DAK sebesar 52,869,750,000 juta rupiah terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016 menjadi 167,525,467,970 juta rupiah pada tahun 2017 DAK turun menjadi 145,231,247,739 juta rupiah dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 203,284,399,558 juta rupiah. Dana Alokasi Khusus untuk Kota Tomohon pada tahun 2014 sebesar 57,711,980,000 juta rupiah, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 178,990,125,263 juta rupiah kemudian terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2018 menjadi 81,557,983,144 juta rupiah. Kemudian yang terakhir Dana Alokasi Khusus Kota Kotamobagu pada tahun 2014 sebesar 37,428,140,000 juta rupiah terus mengalami kenaikan sampai tahun 2016 sebesar 205,604,472,000 juta rupiah. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 137,117,861,000 juta rupiah dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 175,243,246,000 juta rupiah Dana Bagi Hasil juga merupakan dan yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Berikut adalah perkembangan Dana Bagi Hasil di empat Kota di Provinsi Sulawesi Utara:

Tabel 4
Dana Bagi Hasil Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Dapat dilihat pada tabel diatas perkembangan dana bagi hasil di empat kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014-2018. Untuk Kota Manado dana bagi hasil tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp. 120.259.886.656 dan terendah pada tahun 2014 sebesar 98.979.837.552. Untuk Kota Bitung dana tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp. 41.230.475.993 dan terendah pada tahun 2015 sebesar Rp. 29.016.483.606. Kota Tomohon dana bagi hasil tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.900.095.946 dan terendah pada tahun 2014 sebesar Rp. 17.745.533.553. terakhir untuk Kota Kotamobagu dana bagi hasil tertinggi pada tahun 2014 sebesar 25.640.098.518 dan dana bagi hasil terendah pada tahun 2017 sebesar Rp. 14.517.648.524.

Tinjauan Pustaka

Dana Alokasi Umum

Menurut Bastian (2003 : 84) Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.

Dana Alokasi Khusus

Alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Nurlan Darise, 2007).

Dana Bagi Hasil

Menurut Putra, dkk (2015) dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang. Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip by origin, dimana daerah penghasil mendapat lebih banyak dana.

Hal tersebut terjadi karena pemerintah pusat lebih mengutamakan masyarakat setempat daerah penghasil sumber daya agar dapat memberikan manfaat bagi daerah tersebut. DBH yang telah ditransfer dari pemerintah pusat diharapkan untuk dapat meningkatkan alokasi belanja daerah itu sendiri. Sistem dana bagi hasil yang berjalan dengan baik, menandakan terlaksananya otonomi daerah secara luas dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder deskriptif kuantitatif. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 1999). Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan data yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Sumber data berasal dari berbagai sumber antara lain, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Nasional, jurnal-jurnal ilmiah dan literature-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan studi literature untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Provinsi Sulawesi Utara di empat kota yaitu: Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu dengan pengambilan data melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara untuk pengambilan data penelitian. Waktu penelitian adalah Tahun 2014-2018.

Metode Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen, maka pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program *Eviews 8.0*. adapun rumusnya sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

- Y = Belanja Modal
- X₁ = Dana Alokasi Umum
- X₂ = Dana Alokasi Khusus
- X₃ = Dana bagi Hasil
- α = Konstanta/ Intercept
- β = Koefisien Regresi
- e = Standar Error

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) maka dilakukan uji statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi

Tabel 5
Hasil Regresi

Dependent Variable: Y				
Sample: 2014 2018				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 4				
Total panel (balanced) observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.51943	21.70299	3.064989	0.0090
X1	-4.842052	1.863819	-2.597920	0.0221
X2	0.342459	0.152707	2.242595	0.0430
X3	-0.229475	0.500918	-0.458109	0.6544
R-squared	0.511374	Mean dependent var	11.35762	
F-statistic	2.267535	Durbin-Watson stat	2.176385	
Prob(F-statistic)	0.101778			

Sumber : Hasil Olah Eviews

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 5 maka persamaan regresi linier ganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$BM(Y_{it}) = 66.51943 - 4.842052DAU + 0.342459DAK - 0.229475DBH + e$$

Dari persamaan regresi linier ganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta dengan nilai sebesar 66.51943 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen sama dengan nol (0) maka belanja modal yang di lambangkan dengan BM bernilai 66.51943.
2. Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -4.842052 artinya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini menggambarkan bahwa jika DAU naik satu juta, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menurunkan belanja modal sebesar 4.842052.
3. Koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0.342459 artinya menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menggambarkan bahwa jika DAK

naik Satu juta, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menaikkan belanja modal sebesar 0.342459.

4. Koefisien Dana Bagi Hasil sebesar -0.229475 artinya menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini menggambarkan bahwa jika DBH naik satu juta, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menurunkan belanja modal sebesar 0.229475.

Uji Hipotesis

• Uji Statistik t

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial atau individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian uji t dilakukan dengan menggunakan kriteria berdasarkan perbandingan nilai t-statistik (t_{hitung}) dari masing-masing koefisien variabel independen terhadap nilai t_{tabel} dan juga berdasarkan probabilitas (p). Dalam penelitian ini, df ($n-k$) yang dihasilkan sebesar 20 ($20-4$), dimana n sebesar 20 adalah jumlah observasi dan $k = 4$ adalah jumlah variabel dependen dan independen. Dengan nilai df 16 dan signifikansi 0,05, maka nilai t_{tabel} adalah 1.745 Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan menggunakan kriteria pengujian apabila ($t_{hitung} > t_{tabel}$) atau ($p-value < 0,05$) maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil pengujian uji t yang tunjukkan pada tabel 4.3.

1. Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa H_1 : Dana Alokasi Umum (X_1) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.3 diatas, DAU memiliki t_{hitung} sebesar 2.597920 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0221. Hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($2.597920 > 1.745$) dengan nilai signifikansi ($0.0221 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa H_1 : Dana Alokasi Khusus (X_2) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.3 diatas, DAK memiliki t_{hitung} sebesar 2.242595 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0430. Hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($2.242595 > 1.745$) dengan nilai signifikansi ($0.0430 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa H_1 : Dana Bagi Hasil (X_3) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.3 diatas, DBH memiliki t_{hitung} sebesar 0.458109 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.6544. Hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} ($0.458109 < 1.745$) dengan nilai signifikansi ($0.6544 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pembahasan

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, yang artinya apabila dana alokasi umum meningkat maka belanja modal akan turun begitupula sebaliknya *Ceteris Paribus*. Dana transfer pusat berupa dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan yang ada didaerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pengeluaran yang ada didaerah. Hasil penelitian yang didapat menjelaskan bahwa dana alokasi umum yang besar akan cenderung untuk memiliki belanja modal yang rendah hal ini dikarenakan dana alokasi umum digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursita dkk (2020) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal yang artinya apabila belanja alokasi khusus meningkat maka belanja modal juga akan meningkat begitupula sebaliknya *ceteris paribus*. Dana alokasi khusus juga merupakan dana transfer yang bersumber dari APBN yang memiliki tujuan khusus untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Pendapatan pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surakhman dkk (2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdillah dan Murshinto (2016) menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana bagi hasil berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Artinya apabila dana bagi hasil meningkat maka belanja modal akan turun begitupula sebaliknya *ceteris paribus*. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah. Hasil penelitian juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nursita dkk (2020) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota karanganyar.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara.

2. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Dana bagi hasil berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Untuk pemerintah daerah sebagai bahan masukan untuk menambah referensi dalam pembuatan kebijakan dan program untuk daerah. Juga diharapkan dalam pengelolaan dana transfer pusat ini bisa dikelola dengan baik untuk tujuan umum dan khusus bagi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Surakhman, Abid Djazuli, Choiriyah (2019)** Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. KOLEGIAL – Vol.7, No.2. Desember 2019
- Bastian, I. 2003.** Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi UGM.
- Dewi, Siska Puspita dan Suyanto. 2014.** Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah. ISSN 1829-7978 Universitas Sarjana wiyata Taman Siswa Yogyakarta Vol 20 No. 2 Januari (2014): 78-100.
- Darise, Nurlan. 2007.** Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- Erlina., Rambe, O.S., dan Rasdianto. (2015).** Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akruar. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro N & Supomo B, (1999).** Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Nawatmi, Sri, , 2006.** “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Bantuan Pemerintah Pusat di Lima Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol13 No 2, September, 2006.
- Nursita Wulandari Lutpikah, Denny Mahendra (2020)** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. Vol 5, No 2 (2020), Desember; p.147-158 ;<https://e-journal.stieaub.ac.id/index.php/actual>
- Putra, Putu Gede W, dkk. 2015.** “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 11 (3) : 863-877. ISSN: 2302- 8556
- Syaiful 2007.** Pengertian dan perlakuan akuntansi belanja barang dan belanja modal dalam kaidah akuntansi pemerintahan. 9 November 2013. Hal:2-3
<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>.

Wimpi Priambudi (2013), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013,” (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 1.

